

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN DESA (STUDI GEDUNG WANI KECAMATAN MARGA TIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Wayan Ardi Andika¹, Bambang Utoyo S², Eko Budi Sulistio³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
wayanardi997@gmail.com

Abstrak

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan kepala desa Gedung Wani dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Gaya kepemimpinan Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dapat dikategorikan sebagai gaya kepemimpinan partisipatif dalam memimpin rakyatnya. Partisipasi masyarakat dalam membangun desanya sudah baik, hal ini terbukti bahwa saat atau ketika dalam hal keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Namun demikian masih terdapat kekurangan yaitu kepala desa kurang menggerakkan kepala dusun dalam menggerakkan dan melaksanakan pembangunan desa dan masyarakat belum mengetahui secara luas penggunaan dana desa untuk program-program pembangunan desa.

Kata Kunci: *Gaya Kepemimpinan, Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa.*

Abstract

Community participation not only involves the community in making decisions in every development program, but the community is also involved in identifying problems and potentials in the community. Without community participation every development activity will fail. Whatever the form, participation aims to increase the capacity of everyone who is directly or indirectly involved in a development by involving them in decision-making and subsequent activities. The research objective was to describe the leadership style of the village head of Gedung Wani in increasing community participation for village development. This type of research uses a descriptive type of research with a qualitative approach. Based on the results obtained in this study, it can be concluded that: The leadership style of the Village Head of Gedung Wani, Marga Tiga District, East Lampung Regency can be categorized as a participatory leadership style in leading the people. Community participation in developing their village has been good, this is evident from the time or when in terms of community involvement in the development process. However, there are still shortcomings, namely the village head does not move the hamlet head in mobilizing and implementing village development and the community does not know the widespread use of village funds for village development programs.

Keywords: *Leadership Style, Village Head, Community Participation, Village Development.*

I. PENDAHULUAN

Desa adalah cermin utama sukses tidaknya pemerintahan suatu bangsa. Desa jugalah ujung tombak terselenggaranya pemerintahan di suatu negara. Pemerintah

pada Tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni kepala desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala desa memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin untuk menjalankan program pembangunan di desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat desa, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa, kepemimpinan kepala desa merupakan faktor penting dan amat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Kepemimpinan kepala desa memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan dalam pembangunan di desa. Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga desa serta penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintahan desa, kepala desa itu dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa sebagai unsur staf dan kepala dusun sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerja tertentu.

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki kehidupan. Seperti yang dikemukakan oleh Riyadi dalam Theresia (2013:2) bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu, termasuk di dalamnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pemahaman partisipasi masyarakat seringkali memiliki pengertian sebagai dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat pada suatu keputusan pemerintah. Oleh karena itu, ukuran yang dipakai adalah sejauh mana masyarakat menanggapi, melaksanakan dan mau mengikuti kehendak pemerintah tersebut, sehingga lebih bersifat *top down*. Apabila masyarakat tidak patuh dan tidak mendukung sepenuhnya program dari pemerintah, maka masyarakat akan dianggap tidak berpartisipasi dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Pada pandangan ini sebenarnya masyarakat lebih dilihat sebagai objek pembangunan, Partisipasi masyarakat merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan, untuk mendukung hal tersebut diperlukan gaya kepemimpinan kepala desa yang efektif yang dapat berpengaruh positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat desa untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa (Tumbel, 2018: 3).

Berdasarkan hasil prariset yang dilakukan penulis melalui observasi dan informasi dari masyarakat desa yang dilakukan pada Kamis

12 Maret 2020 di Desa Gedung Wani, sejauh ini pembangunan fisik di Desa Gedung Wani sedang diaktifkan kembali, setelah periode kepemimpinan kepala desa sebelumnya hampir tidak ditemukan pembangunan dalam bidang apapun khususnya pembangunan fisik desa. Meningkatnya tingkat partisipasi warga Desa Gedung Wani tersebut tidak terlepas dari pengaruh kepemimpinan kepala desa itu sendiri. Kepemimpinan merupakan aktivitas seorang pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok (Hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Gedung Wani).

Berdasarkan hasil observasi pra riset yang peneliti lakukan dan informasi dari warga masyarakat Kepala Desa Gedung Wani saat ini terus meningkatkan proses pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. Namun pada kenyataannya pembangunan fisik Karena infrastruktur Desa Gedung Wani masih tertinggal terutama dalam infrastruktur jalan. Selain dari pada pembangunan kepala desa Gedung Wani juga menata sistem pemerintahan desa yang sebelumnya tidak aktif seperti lebih sering mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan, membagi kekuasaan yang sesuai tugas dan fungsi dari pada bawahannya dan menata manajemen pemerintahannya.

Kepemimpinan Kepala Desa Gedung Wani dikenal merakyat dan dekat dengan masyarakatnya, hal ini terlihat kepala desa ramah, mudah bergaul dan bersahaja dengan masyarakat yang dipimpinnya. Pencitraan kepemimpinan Kepala Desa Gedung Wani terus-menerus dibangun sebelum terpilih menjadi kepala desa. Sejak awal kepala desa berusaha ramah, sering membantu dan mudah berteman akrab dengan semua lapisan masyarakat. Sifat tersebut membuat masyarakat simpati dan merasa tertarik dengan kepribadian yang dimiliki kepala desa. Sifat kepala desa yang mampu membuat orang simpatik dan bisa memengaruhi masyarakat mengikuti pemikirannya terus melekat hingga sekarang.

Hasil pengamatan penulis selanjutnya terlihat bahwa di Desa Gedung Wani terjadi perubahan kondisi fisik pada akhir waktu ini dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam

membantu pembangunan fisik desa. Penulis menghubungkan dengan kepemimpinan kepala desa yang menjabat, bahwa memang ada hubungan antara kepemimpinan dengan pembangunan desa. Kegiatan gotong royong di desa ini pun lebih aktif dibandingkan desa-desa tetangga lainnya. Pembangunan fisik desa yang terjadi meliputi perbaikan jalan raya, gorong-gorong, siring atau drainase air, dan tiang jaringan listrik. Perbaikan jalan dilakukan dengan dana ADD pembangunan gorong-gorong dan pos ronda menggunakan dana swadaya masyarakat, kepala desa bersama kepala dusun dan ketua RT untuk membantu pembangunan fisik di desanya. Partisipasi masyarakat dalam bentuk moril atau tenaga dan materil atan iuran merupakan Semua pembangunan fisik Desa Gedung Wani di atas sudah selesai terlaksana karena setiap dana yang digunakan selalu habis pakai.

Alasan pengambilan judul mengenai gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa karena kepemimpinan Kepala Desa sangat dibutuhkan untuk memberikan pengaruh agar masyarakat peduli dan mau berpartisipasi pada semua program yang ada di desa. Namun pada kenyataannya pemimpin justru sibuk dengan urusan pribadinya dibandingkan dengan dengan urusan rakyatnya, sehingga rakyat enggan untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di desanya. Akibatnya pembangunan Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur belum merata.

II. TINJAUAN LITERATUR

Kepemimpinan

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan bermacam macam karena perbedaan kebutuhan ini maka manusia saling membutuhkan sehingga diperlukan kerjasama yang melahirkan suatu wadah atau tempat berkumpul maka terciptalah suatu komunitas atau organisasi yang mempunyai tujuan yang sama.

Kreith dan Knicki (dalam Nawawi, 2003:21) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi anggota untuk

mencapai tujuan organisasi secara sukarela. Pengertian ini menekankan pada kemampuan pemimpin yang tidak memaksa dalam menggerakkan anggota organisasi agar mau melakukan pekerjaan/kegiatan yang terarah pada tujuan organisasi. Artinya seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh tauladan yang baik agar dengan sendirinya anggotanya akan mengikutinya.

Terry (dalam Sulistio dan Sulistiowati, 2015: 149), mengatakan kepemimpinan adalah upaya menggunakan berbagai jenis pengaruh yang bukan paksaan untuk memotivasi anggota organisasi agar mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah usaha seorang pemimpin untuk dapat membangkitkan rasa percaya diri anggotanya untuk melakukan sesuatu dengan sukarela pada tujuan tertentu.

Menurut Rivai (2003:21), kepemimpinan adalah seorang pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok.

Tiga aplikasi penting dalam kepemimpinan yaitu:

1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut
2. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang
3. Adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab serta berkualitas

Berdasarkan definisi di atas dapat dilihat bahwa kepemimpinan menyangkut orang mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu kepemimpinan memerlukan keahlian atau kemampuan agar orang lain dapat digerakkannya. Artinya pemimpin dapat memotivasi bawahannya sehingga bawahan mau bekerja secara sukarela tanpa paksaan.

Kepemimpinan merupakan suatu faktor penentu dalam suatu organisasi, karena kedudukannya penting dan strategis. Siagian (1985: 36) mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan inti manajemen,

karena kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat manusia alat alat lainnya dalam suatu organisasi. Demikian pentingnya peranan kepemimpinan dalam usaha mencapai tujuan organisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses dan kegagalan yang dialami sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang disertai tugas memimpin dalam suatu organisasi. Setiap komunitas atau organisasi membutuhkan seorang pemimpin yang menjalankan kegiatan kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kelompoknya dengan kata lain seorang pemimpin membutuhkan anggotanya untuk dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Rivai (dalam Sulistio dan Sulistiowati, 2015: 149), pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk menggerakkan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pemimpin tidak bekerja sendiri untuk mencapai tujuan organisasinya, tetapi harus dibantu orang lain dalam hal ini anggotanya, untuk itu pemimpin harus dapat menciptakan suasana yang kondusif di lingkungannya sehingga menghasilkan efisiensi kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disisi lain pemimpin harus menyatu dengan bawahan namun wibawa sebagai seorang pemimpin harus tetap dijaga. Aktualisasi seorang pemimpin adalah menciptakan suasana dan pola kepemimpinan dan diharapkan para bawahan.

Model kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, karena model kepemimpinan akan efektif jika disesuaikan dengan tingkat kematangan anak buah. Kepemimpinan partisipatif didefinisikan seorang pemimpin mengikutsertakan anak buah bersama-sama berperan di dalam proses pengambilan keputusan. Model kepemimpinan seperti ini diterapkan apabila tingkat kematangan anak buah berada pada taraf kematangan moderat sampai tinggi. Mereka mempunyai kemampuan, tetapi kurang memiliki kemauan kerja dan kepercayaan diri.

Kepemimpinan partisipatif didefinisikan sebagai persamaan kekuatan dan sharing

dalam pemecahan masalah dengan bawahan dengan melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum membuat keputusan. Kepemimpinan partisipatif berhubungan dengan penggunaan berbagai prosedur keputusan yang memperbolehkan pengaruh orang lain mempengaruhi keputusan pemimpin.

Gaya kepemimpinan partisipatif adalah seorang pemimpin yang mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan (Yukl, 1998:102). Indikator dalam gaya kepemimpinan partisipatif mencakup konsultasi, pengambilan keputusan bersama, membagi kekuasaan, desentralisasi dan manajemen yang demokratis. Mitch Mc Crimmon (2007) menulis bahwa menjadi pemimpin yang partisipatif berarti melibatkan anggota tim dalam pembuatan keputusan. Hal ini terutama penting manakala pemikiran kreatif diperlukan untuk memecahkan masalah yang kompleks atau membuat keputusan yang akan berdampak pada anggota tim.

Gaya kepemimpinan partisipatif lebih menekankan pada tingginya dukungan dalam pembuatan keputusan dan kebijakan tetapi sedikit pengarahan. Gaya pemimpin yang tinggi dukungan dan rendah pengarahan dirujuk sebagai "partisipatif" karena posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Dengan penggunaan gaya partisipatif ini, pemimpin dan bawahan saling tukar menukar ide dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan.

Pada aktivitas menjalankan organisasi, pemimpin yang menerapkan gaya ini cenderung berorientasi kepada bawahan dengan mencoba untuk lebih memotivasi bawahan dibandingkan mengawasi mereka dengan ketat. Mereka mendorong para anggota untuk melaksanakan tugas-tugas dengan memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, menciptakan suasana persahabatan serta hubungan-hubungan saling mempercayai dan menghormati dengan para anggota kelompok. Persepsi bawahan terhadap gaya kepemimpinan partisipatif adalah cara seorang bawahan memberikan arti atau menilai cara pimpinan bekerja bersama bawahan dengan konsultasi

dan dengan mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan.

Agar proses inovasi di desa dapat berjalan dengan baik, kepala desa perlu dan harus bertindak sebagai pemimpin (leader) dan bukan bertindak sebagai bos. Ada perbedaan di antara keduanya. Oleh karena itu, seharusnya kepemimpinan kepala desa harus menghindari terciptanya pola hubungan dengan bawahan yang hanya mengandalkan kekuasaan, dan sebaliknya perlu mengedepankan kerja sama fungsional. Kepala desa juga harus menghindarkan diri dari one man show, sebaliknya harus menekankan pada kerja sama antar teman sepekerjaan, menghindari terciptanya suasana kerja yang serba menakutkan, dan sebaliknya perlu menciptakan keadaan yang membuat semua bawahan percaya diri.

Berdasarkan beberapa konsep teori tersebut penulis menggunakan teori gaya kepemimpinan partisipatif dari (Yukl, 1998:102). Gaya kepemimpinan partisipatif adalah seorang pemimpin yang mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan Adapun aspek-aspek dalam gaya kepemimpinan partisipatif mencakup konsultasi, pengambilan keputusan bersama, membagi kekuasaan, desentralisasi dan manajemen yang demokratis.

Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa. Kepemimpinan Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa yang dapat dilihat dari gaya kepemimpinan kepala desa tersebut (Ashshidique, 2010: 33).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26-30 dikatakan bahwa bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan perwakilan desa. Pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Peraturan Pemerintah tersebut dipilih langsung oleh

penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa hanya boleh menduduki jabatan kepala desa lagi untuk satu kali masa jabatan. Seorang kepala desa hanya boleh menjabat selama dua kali masa jabatan. Pada pelaksanaan tugas dan wewenangnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang bertanggung jawab kepada kepala desa.

Menurut Asshidiqie (2010: 33) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Asshidiqie (2010: 33) Kepala Desa mempunyai kewajiban

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.

- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Secara administratif, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan karena merupakan syarat utama dalam kehidupan demokrasi di era ekonomi saat ini (Faedlulloh:2018), namun semua itu tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa adanya usaha-usaha dari semua pihak terutama peran seorang

pemimpin yang memotivasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan.

Partisipasi demikian tidak datang dengan sendirinya. dibutuhkan usaha-usaha untuk menumbuhkannya dengan kemampuan, ketekunan dan waktu. untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar tersebut, salah satu segi yang perlu mendapat perhatian adalah komunikasi. Menurut Tjokroamidjojo (1986: 227) menyatakan bahwa gagasan-gagasan, kebijaksanaan dan rencana hanya akan mendapat dukungan, bila diketahui kemudian dimengerti, bahwa hal-hal tersebut mencerminkan sebagian atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat (kelompok masyarakat).

Menurut Sutoro (2001: 32) ada beberapa strategi untuk memperkuat partisipasi rakyat dalam pembangunan:

1. Mengeksplorasi nilai-nilai yang berkaitan dengan semangat partisipasi. Nilai-nilai meliputi kebersamaan dan solidaritas, kesadaran kritis, sensitif terhadap perubahan, peka dan berpihak pada kelompok tertindas.
2. Menghidupkan kembali institusi-institusi volunteer sebagai media kewargaan yang pernah hidup dan berfungsi. Eksistensi dan fungsi kelembagaan ini menjadi pilar nyata partisipasi warga dalam proses pembangunan, seperti keberadaan forum rembung desa.
3. Memfasilitasi terbentuknya asosiasi-asosiasi kewargaan yang baru berbasiskan kepentingan kelompok keagamaan, ekonomi, profesi, minat, dan hobi, dan politik maupun aspek kultural lainnya.
4. Mengkampanyekan mengenai pentingnya kesadaran inklusif bagi warga desa dalam menyikapi sejumlah perbedaan yang terjadi dengan mempertimbangkan kemajemukan.
5. Memperluas ruang komunikasi publik, yang dimanfaatkan warga desa untuk melakukan kontak-kontak sosial dan kerjasama.

Kelima strategi di atas merupakan jalan penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.

Pembangunan

Berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana. Pembangunan Desa. Masyarakat

Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomenal. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan untuk membangun hipotesis dan teori (Moleong, 2006: 151).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Gedung Wani

Desa Gedung Wani dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang memiliki berbagai fungsi untuk menjalankan peran dan tugas, khususnya di dalam organisasi pemerintahan desa, termasuk akan menjalankan berbagai peran sebagai seorang pimpinan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti bagaimana menggerakkan kemampuan kerja pegawai serta masyarakat yang dipimpinnya. Di dalam penelitian ini akan dideskripsikan gaya pimpinan Kepala Desa. Untuk jelasnya mengenai berbagai dimensi tersebut dibahas sebagai berikut.

1. Konsultasi

Sebagai Kepala Desa Gedung Wani Marga Tiga sudah menunjukkan konsultasi dengan baik. Apabila terdapat suatu masalah, kepala desa selalu melibatkan bawahannya. Hal ini dilakukan dengan diskusi terlebih dahulu dengan membicarakan solusi yang cocok untuk permasalahan yang terjadi. Jadi

dalam hal keterlibatan bawahan itu penting karena mereka lebih banyak tahu tentang masalah yang terjadi di kantor Desa Gedung Wani Marga Tiga.

2. Keputusan Bersama

Pengambilan keputusan bersama pada dasarnya adalah proses pemecahan masalah yang menghalangi atau menghambat tercapainya tujuan. Agar masalah masalah dapat dipecahkan, terlebih dahulu harus dikenali apa masalahnya. Pengambilan keputusan merupakan usaha penciptaan kejadian-kejadian dan pembentukan masa depan (peristiwa-peristiwa pada saat pemilihan dan sesudahnya).

3. Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan merupakan kapasitas untuk mempengaruhi secara unilateral sikap dan perilaku orang kearah yang di inginkan. Suatu aktifitas untuk mempengaruhi perilaku orang. Lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Perlu diketahui bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal dimaksud tidak mengulangi kedaulatan NKRI, yang penggolongannya menjadi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga pembagian kekuasaan tersebut bukan pembagian kedaulatan, melainkan hanya pembagian kekuasaan dalam melaksanakan urusan pemerintahan atau yang sering disebut pembagian urusan (HM. Agus Santoso, 2013: 177).

4. Desentralisasi

Desentralisasi adalah pelimpahan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan juga dari pemerintah daerah kepada unit-unit kerja birokrasi pemerintah daerah. Desentralisasi menghasilkan pemerintah lokal dalam bentuk desentralisasi dimana unit-unit lokal ditetapkan dengan kekuasaan tertentu atas bidang tugas tertentu.

5. Manajemen Demokrasi

Manajemen demokrasi adalah proses penilaian individu mengenai kemajuan penilaian individu mengenai pelaksanaan pekerjaan ditempat kerja untuk mempermudah kemajuan secara sistematis. Sementara itu banyak faktor

yang mempengaruhi kinerja pegawai. Pegawai bekerja dengan produktif atau tidak tergantung pada motivasi, kepuasan kerja, tingkat konflik, kondisi fisik pekerjaan.

Kepemimpinan kepala desa dalam konteks ini adalah kepemimpinan formal yang perilaku kepemimpinannya harus sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini kepemimpinan Kepala Desa berorientasi pada tugas-tugas tertentu yang diberikan kepada pemerintah pusat, yang memiliki kewenangan khusus yaitu mengatur dan melakukan kebijakan untuk desa yang dipimpinnya dan bersama-sama membangun desanya dengan partisipasi masyarakat dan aparat kampung yang ada dengan peraturan yang ada.

Gaya kepemimpinan Kepala Desa yang sesuai adalah pemimpin yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan pemerintahannya dengan amanah, musyawarah bersama masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, bersikap adil, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan ide dan gagasan yang sifatnya membangun. Gaya kepemimpinan ini menciptakan pemerintahan desa yang damai dan tenteram dengan memiliki tujuan yang sama untuk semua kalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kepala Desa Gedung Wani memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang memotivasi masyarakat untuk bersama-sama melakukan perubahan yang lebih baik merupakan unsur yang penting untuk dilakukan karena desa merupakan sebuah organisasi formal yang di dalamnya terdapat segelintir masyarakat yang pastinya ingin ikut serta dalam pembangunan desa, maka musyawarah itu penting untuk dilakukan. Selain itu jika dilihat dari indikator Perilaku pemimpin dengan pernyataan Kepala Desa bertindak tegas terhadap masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan ide-ide untuk mengatasi masalah yang terjadi. Akan tetapi jika dilihat dari fakta dilapangan bahwa masih banyaknya program yang harus diselesaikan oleh kepala desa pada Desa Gedung Wani

untuk membangun desanya. Dikarenakan desa tersebut masih sangat terbatas akan pembangunan baik pembangunan insfrastruktur, kesehatan, maupun ekonomi.

Kepala Desa berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah badan pelaksana kebijakan yang dibuat bersama dengan Badan Perwakilan Desa. Sedangkan Badan Perwakilan Desa adalah sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat. Bersama-sama pemerintah desa membuat dan menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan APBD serta keputusan Kepala Desa. Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat, seperti halnya pembangunan di desa.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan warga baik sebagai individu ataupun kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan yang didesain oleh kesadaran warga, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa paksaan dari pihak-pihak tertentu. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu proses dimana masyarakat sebagai *stakeholder* terlibat, mempengaruhi, mengendalikan pembangunan ditempat mereka masing-masing secara aktif memprakarsai perbaikan kehidupan mereka melalui proses pembuatan keputusan dan sumber daya suatu penggunaannya.

1. Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu peran serta yang dilakukan pada tahap satu kegiatan sedang direncanakan, dipersiapkan serta penetapan segala ketentuan-ketentuan yang akan dipakai nantinya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pengambilan keputusan yang dimaksud

disini adalah peran serta yang dilakukan pada tahap satu kegiatan sedang direncanakan, dipersiapkan serta penetapan segala ketentuan-ketentuan yang akan dipakai nantinya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

2. Pelaksanaan Perencanaan

Partisipasi masyarakat yang tinggi pada saat perencanaan pembangunan, seperti pada rapat perencanaan pembangunan di Desa Gedung Wani Marga Tiga ternyata tidak diikuti dengan partisipasi masyarakat saat pelaksanaan pembangunan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa merupakan tujuan dari pemerintah desa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan partisipasi yang meningkat, maka perlunya dukungan dari gaya kepemimpinan kepala desa. Dalam artian bahwa gaya kepemimpinan kepala desa memberi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah hal-hal yang berkaitan dengan orientasi seksual masyarakat. Partisipasi dari kaum laki-laki dan perempuan terhadap sesuatu hak akan berbeda. Hal ini terjadi karena adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat yang membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan pada derajat yang berbeda. Perbedaan ini pada akhirnya melahirkan kedudukan dan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat.

2. Pendidikan

Faktor pendidikan dianggap penting karena melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi. Dengan demikian dapat dipahami bila ada hubungan antara tingkat pendidikan dan peran serta. Demikian pula halnya dengan tingkat pengetahuan, bila salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-

usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan.

3. Pekerjaan

Menurut Yulianti (2012) partisipasi berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya.

Pembangunan desa memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam pembangunan desa akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan desa dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran suatu Negara. Dengan adanya pembangunan desa akan memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pembangunan desa tentu akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat misalnya pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan vital yang harus dipenuhi. Dengan kondisi jalan yang baik membuat tenaga ahli, pendamping desa mampu menjalankan tugasnya memberikan bimbingan serta pembinaan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hadirnya pembinaan-pembinaan tersebut dapat memberikan perbaikan perilaku hidup sehat untuk masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya pembangunan desa dapat mengembangkan potensi lokal menjadi kawasan wisata yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Seperti halnya di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur memiliki beberapa potensi daerah yang dapat dikembangkan berkat keindahan alamnya. Desa ini memiliki bentangan sawah yang hijau yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan agrowisata selain penyumbang kebutuhan beras. Dampak pembangunan infrastruktur dapat menjadi

pendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. Apabila pembangunan Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur ini dapat terealisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari segi kesehatan maupun perekonomian sehingga cita-cita untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Dengan adanya pembangunan desa maka akan mempermudah masyarakat untuk melaksanakan kelangsungan hidup demi meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

Pembangunan desa sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, apabila pembangunan desa semakin baik dan cepat maka semakin baik dan cepat pula kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa tersebut, sebaliknya apabila pembangunan desa kurang baik atau lambat dalam perkembangannya, maka perkembangan masyarakat dan kesejahteraannya pun masih kurang cukup. Kualitas pembangunan sangat berpengaruh pada standar kehidupan masyarakat karena infrastruktur yang baik dan tangguh akan mampu melayani dan memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan kualitas hidupnya.

Pada hakekatnya tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa masyarakatnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar dapat menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal demi tercapainya program pembangunan. Pembangunan Desa sesungguhnya

merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari Desa, bantuan Pemerintah maupun bantuan Organisasi-Organisasi atau Lembaga Domestik maupun Internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik.

Faktor kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan Pembangunan Desa. Karena masyarakat merupakan penggerak pada proses pelaksanaan pembangunan tersebut. Namun pada saat sekarang ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana memperbaiki kondisi sosial dan Desa yang selama ini sudah terlalu identik dengan keterbelakangan dan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan sangatlah sulit. Dikarenakan minimnya tingkat kesadaran tersebut sehingga pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. Disinilah pentingnya seorang Kepala Desa. Sebab pada tingkatan pemerintahan paling bawah, Kepala Desa sebagai aktor dalam menjalankan kepemimpinannya berperan dalam melakukan rentetan usaha bersama masyarakat untuk perbaikan dalam segala aspek kehidupan di Desa.

Dalam hal ini kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur yang berperan sebagai pemimpin di dalam Desa tersebut hendaknya memiliki kemampuan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar mau berpartisipasi di dalam pelaksanaan pembangunan, baik itu partisipasi dalam bentuk tenaga, uang maupun barang sebagai perlengkapan untuk pelaksanaan Pembangunan Desa. Hal tersebut telah dilakukan oleh Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Kepala Desa memberikan pengarahan kepada seluruh masyarakatnya mengenai pentingnya pembangunan yang akan dilaksanakan ini demi masyarakat pada saat pembukaan pelaksanaan pembangunan.

Kepala Desa maupun Aparat Desa hendaknya mampu mensosialisasikan dengan jelas kepada seluruh masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan, seperti sosialisasi mengenai apa jenis pembangunan yang akan

dilaksanakan, dimana pembangunan tersebut akan dilaksanakan, kapan pembangunan akan mulai dilaksanakan serta siapa-siapa saja yang harus terlibat didalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sosialisasi tersebut misalnya dengan melakukan pertemuan antara Kepala Desa dengan masyarakat, ataupun dengan mendatangi langsung satu persatu masyarakatnya untuk mensosialisasikan kegiatan gotong royong, yang hendaknya dilakukan oleh Kepala Desa maupun Aparat Desanya. Namun kenyataannya, sosialisasi disini masih sangat kurang, sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengerti dengan kegiatan pembangunan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hanya sedikit masyarakat yang mau hadir pada saat kegiatan gotong royong pelaksanaan pembangunan meskipun pada saat libur kerja. Dengan alasan mereka tidak mengetahui bahwa pada hari itu ada kegiatan gotong royong karena tidak ada yang memberitahukan.

Upaya kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah

a. Memberikan Motivasi

Motivasi dalam hal pembangunan desa sangat diperlukan dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desanya. Seorang Kepala Desa selaku pemimpin formal di desa harus mampu menggerakkan, mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, karena tujuan dari pembangunan itu tidak akan dapat terwujud apabila tidak ada keterlibatan masyarakat didalamnya. Motivasi adalah sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Seperti halnya dengan pendapat di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan peranannya sebagai administrator pembangunan yang salah

satunya yaitu pemberian motivasi kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi di dalam membangun desanya. Motivasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur kepada masyarakatnya ialah berupa motivasi secara sosial, fisiologis maupun motivasi pemberian semangat dalam mengikuti kegiatan yang ada di desa.

b. Melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi, karena organisasi merupakan pelaksana fungsi manajemen dari seorang pemimpin dalam rangka menghimpun orang-orang, materi dan metode untuk bekerjasama ke arah pencapaian tujuan. Sebelum mengkoordinasi setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan program pembangunan yang akan dilakukan di desa, maka terlebih dahulu Kepala Desa mengkomunikasikan dengan perwakilan desa untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan. Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan mengadakan rapat desa yang bertempat di kantor desa dengan mengundang perwakilan desa seperti ketua RT/RW, tokoh masyarakat, LKMD, BPD dan perangkat desa. Rapat ini dilakukan untuk membahas program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

c. Melaksanakan Tugas Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu organisasi di dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan, apakah di dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum.

Kaitannya dengan itu, Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur di dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desanya, dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa sebagai berikut:

a. Kendala Internal

1) Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia dengan sukarela ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya. Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desanya, sudah sangat baik terbukti dengan partisipasi dari masyarakat yang sangat tinggi dalam pembangunan desa, hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam setiap pelaksanaan program-program pembangunan. Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur selain dilakukan dalam sebuah rapat pertemuan dan musyawarah (rembug desa) juga dilakukan pada saat Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur melakukan kunjungan ke wilayah lingkungan RT/RW. Sehingga diharapkan dengan terjalannya komunikasi yang baik, maka Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur akan lebih mengerti kepentingan dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, kaitannya dengan pembangunan yang akan

dilaksanakan di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

2) Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Model kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin di dalam memimpin warganya maupun di dalam mengupayakan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan akan mempengaruhi intensitas partisipasi masyarakat yang akan diberikan terhadap pembangunan di desanya. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur adalah gaya kepemimpinan demokratis karena pendekatan yang digunakan yaitu partisipatif, hal ini dimaksudkan agar terwujud kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan dengan memberdayakan partisipasi masyarakat dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan.

b. Kendala Eksternal

1) Kecenderungan Masyarakat Untuk Menunggu Bantuan

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan dengan adanya bantuan dan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupa ADD tersebut telah mendukung dan membantu pelaksanaan program pembangunan yang ada di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Namun, di sisi lain, dengan adanya bantuan tersebut telah membuat sebagian masyarakat menjadi mempertimbangkan bantuan atau sumbangan apa yang akan diberikan untuk pembangunan di desanya karena masyarakat lebih cenderung untuk menunggu bantuan dana dari Pemerintah. Kecenderungan berpikir seperti ini

muncul karena dengan adanya ADD tersebut telah membuat masyarakat jadi menggantungkan dalam hal pembiayaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Masyarakat masih ada yang berangapan bahwa pembangunan di desa mereka sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah, padahal maksud dari ADD itu sendiri ialah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintadnan pemberdayaan masyarakat, jadi tidak sepenuhnya hanya untuk pembangunan fisik desa saja.

2) Tingkat Pendapatan Masyarakat

Hambatan yang sering dihadapi dalam suatu kegiatan yaitu kurangnya dana yang diperlukan untuk jalannya proses kegiatan tersebut. Seperti halnya yang terjadi di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, masyarakat Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur sangat antusias sekali dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya, mereka akan mengerahkan segala tenaga dan pikirannya untuk suksesnya pembangunan tersebut, namun jika diperlukan sumbangan dana yang sedikit besar, hal ini akan sulit bagi sebagian masyarakat Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

Keadaan seperti ini bisa dipahami mengingat tingkat pendapatan masyarakat Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur yang sebagian besar masih rendah, karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai petani atau bahkan buruh tani, yang mana upah sebagai buruh tani hanya cukup untuk kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, diharapkan

bagi masyarakat Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur yang mempunyai tingkat ekonomi yang baik diharapkan memberikan sumbangan yang lebih baik untuk menutupi kekurangan sumbangan yang diberikan oleh masyarakat yang kurang mampu, dengan begitu kekurangan dana untuk pembangunan desa dapat tertutupi.

3) Tingkat Pendidikan Masyarakat

Faktor penghambat bagi Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur di dalam menyampaikan informasi dan program-program pembangunan kepada masyarakat desa yang seringkali dihadapi yaitu faktor rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang rendah seperti ini, menjadikan hambatan kepada Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur di dalam penyampaian setiap informasi dan program-program pembangunan, mereka kurang tanggap, tidak cepat mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu diharapkan agar warga masyarakat saling melengkapi, maksudnya disini ialah untuk masyarakat yang berpendidikan tinggi diharapkan agar dapat membantu upaya Kepala Desa di dalam menyampaikan informasi tentang program-program pembangunan kepada masyarakat yang berpendidikan rendah, karena mereka lebih cepat mengertidan memahami tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Sedangkan untuk masyarakat yang berpendidikan tinggi yang enggan melakukan pekerjaan kasar, diperlukan pendekatan oleh Kepala Desa kepada mereka dengan memberikan pengertian dan arahan

bagaimana pentingnya partisipasi tenaga mereka dalam kegiatan pembangunan seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah dalam membangun desa, hal ini dilakukan agar masyarakat yang berpendidikan tinggi menjadi termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa demi terwujudnya tujuan bersama masyarakat untuk kemajuan desa.

Selain itu Kepala Desa juga diharapkan bisa memberikan pengawasan yang maksimal pada saat pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Namun, pada kenyataannya pada saat pelaksanaan pembangunan, masih kurangnya pengawasan dari Kepala Desa, hal ini dibuktikan dengan ketidakhadiran Kepala Desa pada saat kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa yang ada di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Sehingga pembangunan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengaruh dari pemerintah dalam hal ini Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya pelaksanaan Program Pembangunan yang maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif dalam memimpin rakyatnya. Gaya ini cocok untuk memenuhi keempat persyaratan pemimpin yang baik. Gaya ini cenderung lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membangun desanya.

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan Kepala Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten

Lampung Timur dapat dikategorikan sebagai gaya kepemimpinan partisipatif dalam memimpin rakyatnya, yang mencakup konsultasi antara kepala desa dengan masyarakatnya, pengambilan keputusan bersama dengan masyarakat khususnya dalam pembangunan, membagi kekuasaan terutama dalam tahap pembangunan, desentralisasi dan manajemen yang demokratis melalui musyawarah desa.

2. Partisipasi masyarakat dalam membangun desanya sudah baik, hal ini terbukti bahwa saat atau ketika dalam hal keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
3. Namun demikian masih terdapat kekurangan yaitu kepala desa kurang menggerakkan kepala dusun dalam menggerakkan dan melaksanakan pembangunan desa dan masyarakat belum mengetahui secara luas penggunaan dana desa untuk program-program pembangunan desa

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi kepala desa, diharapkan gaya kepemimpinan yang telah diterapkan di lingkungan masyarakatnya lebih ditingkatkan, hal ini karena gaya kepemimpinan Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur memberikan pengaruh positif yang sangat nyata terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Untuk itu kepala desa dapat menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif sehingga partisipasi masyarakat meningkat.
2. Diharapkan kepada Kepala Desa membuat tim khusus dan memberikan arahan kepada Kepala Dusun untuk mengevaluasi dan mengawasi pembangunan desa.
3. Diharapkan kepada Masyarakat desa sebaiknya memantau penggunaan dana yang digunakan untuk program pembangunan desa, dengan cara mengikuti musyawarah desa yang dilaksanakan pemerintah desa untuk

menjelaskan dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Asshidiqie, Jimly (2010) Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan kepemilikan warga: membangun skema organisasi partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1).
- Farid, M. (2019). *Analisis Kepemimpinan Penghulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Kepenghuluan Sungai Segajah Di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hamijoyo. 2007. *Partisipasi dalam Pembangunan*. Jakarta:Depdikbud RI.
- Hasanah, I. A. (2015). *Hubungan Antaralingkungan Kerja Dengan Produktivitas Kerja Guru di Madrasah Aliyah Negeri 7 Jombang* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Hasibuan. Malayu. (2007). *Manajemen*. Edisi II BPFE UGM. Yogyakarta.
- Kartono, Kartini. (2010). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT. Raja. Grafindo Persada. Jakarta
- Kumorotomo, Wahyudi (1992) *Etika Administrasi Negara*. Ed. 1 Cet 2. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Islami, L. N. (2019). Partisipasi Masyarakat untuk pembangunan desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. *SKRIPSI Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Fakultas Ilmu Sosial UM*.
- Lista Nurhayati. (2014). *Pengaruh Kepemimpinan Dan Komunikasi Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat untuk pembangunan desa Taikako Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai*. Journal article Pendidikan Ekonomi
- Moleong, J. Lexy (2017) *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya Bandung.
- McCrimmon, M. (2007). *What is Management? How management differs from leadership*.
- Nawawi, Hadari. (2003). *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta Edisi 2: Gajah Mada Unisity Press
- Ndraha, Talizidhuhu. (1983). *Pembangunan masyarakat desa*. Jakarta: Rireba Cipta.
- Pratikno, Riyono (2012). *Keuangan Daerah: Manajemen dan Kebijakan*, MAP- UGM, Yogyakarta.
- Rinaldi, M. R. (2016). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Sripendowo Terhadap Partisipasi Masyarakat untuk pembangunan desa*. Jurnal Penelitian.
- Rivai, Veithzal. (2003) *Kepemimpinan dan perilaku Organisasi*. Rajawali Press Jakarta
- Sastroepetro, Santoso (1986). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: PT Alurni.
- Siagian P. Sondang (1985). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siagian P. Sondang (2008). *Teori dan Praktek Kepemimpinan Edisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, Eko Budi dan Sulistiowati, Rahayu (2015). *Azas-Azas Manajemen*, Aura Publishing, Bandar Lampung.
- Sutoro, Eko (2001) *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Theresia, Aprilia (2013) *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.
- Todaro, Michael P (2003) *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Rineka Cipta.

- Tjokroamidjojo, Bintoro (1986) *Pengantar Administrasi pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Tumbel, Satria Mentari (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal PSP Pascasarjana UNSRAT.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yukl, G.A. (1998). *Leadership in Organizations*. New Jersey: Prentice Hall.